



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOVEL ARSYAD**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **408317**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 283 m2/350 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.450.000.000
3. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/79 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/94 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 3.095.000.000

1. MOBIL, MINI COOPER MINI COOPER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. MOBIL, SUZUKI NEW JIMNY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. MOBIL, BMW X5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.670.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	290.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	8.479.162.721
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.953.768.805
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	37.318.231.526
III. HUTANG	Rp.	321.720.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	36.996.511.526

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.